Perubahan Perilaku Pemilih (*Voting Behaviour*) Partai Politik Islam Dalam Sejarah Kofigurasi Politik Indonesia

Ahmad Gelora Mahardika¹, Sun Fatayati²

¹Institut Agama Islam Negeri Tlulungagung, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri

¹geloradika@gmail.com, ²sunfatayati13@gmail.com

Abstract

This paper aims to examine the phenomenon of the decline of voters in Islamic ideology in Indonesia. Indonesian history notes that Islamic Political Parties have triumphed in political circles with their ability to impose fierce debates against nationalist groups and religions other than Islam when discussing constitutional changes. The endless debate then forced President Soekarno to issue a presidential decree. The sweet history of Islamic Political Parties began to decline when the regime of the New Order government fused authoritatively and caused no more unity of opinion in the Islamic party. At present, Islamic ideology political parties also have a tendency to turn to the *Cacth All* Party, which is considered more profitable and provides wider opportunities to gain power. This paper aims to prove the changing behavior of voters of Islamic political parties in the history of Indonesia's political configuration.

Key Word: *Tolerance, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar*

Abstrak

Tulisan ini hendak mengkaji fenomena merosotnya pemilih Partai Politik berideologi Islam di Indonesia. Sejarah Indonesia mencatat, Partai Politik Islam pernah berjaya di percaturan politik dengan kemampuannya memaksakan perdebatan sengit melawan kelompok nasionalis dan agama selain Islam ketika membahas perubahan konstitusi. Perdebatan yang tak ada ujungnya itu kemudian memaksa Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden. Sejarah manis Partai Politik Islam mulai menurun ketika rejim pemerintahan orde baru melakukan fusi secara otoritatif dan menimbulkan tidak adanya lagi kesatuan pendapat di partai Islam. Saat ini, Partai Politik berideologi Islam juga mempunyai kecenderungan untuk beralih ke Partai *Cacth All* yang dianggap lebih menguntungkan dan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh kekuasaan. Tulisan ini hendak membuktikan adanya perubahan

perilaku pemilih partai politik Islam dalam sejarah konfigurasi politik Indonesia.

Kata Kunci: *Toleranse, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar*

Pendahuluan

Sejak Pemilu 1955, ideologi politik Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu ideologi politik Islam dan Nasionalis. Pada tahun 1959, kedua kelompok ideologi tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda terkait rencana perubahan konstitusi RIS. Perdebatan sengit itu dilatar belakangi perbedaan visi disertai prosentase jarak perolehan suara partai politik yang beraliran Islam dan Nasionalis yang relatif tidak terlampaui jauh. Dengan potensi suara yang sedemikian besar, komoditas suara Partai Politik Islam seakan-akan menjadi magnet politik dalam setiap periode pemilihan. Namun seiring berjalannya waktu, dinamika politik yang semakin dinamis, memaksa partai politik mulai bersikap pragmatis dan realistis. Sikap pragmatisme itu berimplikasi dengan dikesampingkannya ideologi partai yang telah digagas oleh para *founding fathers* mereka.

Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional sebagai contohnya. Kedua partai politik ini mutlak berasal dari rahim gerakan akar rumput Islam Tradisionalis dan Modernis di Indonesia. Partai Kebangkitan Bangsa didirikan secara langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid, sedangkan Amin Rais yang menjadi deklarator Partai Amanat Nasional merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Tidak ada seorangpun yang menyangkal bahwa kedua Partai yang lahir dari rahim demokrasi ini merupakan turunan dari Partai Masyumi dan NU yang dahulu dikenal sebagai partai *major* (besar) pada Pemilu 1955. Tidak ada yang membantah pula seberapa besar kontribusi Masyumi dan NU pada tahun 1959 dalam memperjuangkan konstitusi Indonesia agar lebih bernafaskan nilai-nilai Islam. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir ini kedua partai tersebut diatas dengan tegas menyebut mereka adalah partai terbuka - atau disisi lain bukan Partai khusus Islam - meskipun dalam kenyataannya perolehan suara terbesar mereka didapat dari kantong-kantong pendukung NU dan Muhammadiyah.

Disisi lain, Partai Politik yang secara terus terang menggunakan Islam sebagai ideologinya dan masih bertahan hanyalah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang. Yang menjadi fenomenal adalah keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PKS adalah partai yang memperdagangkan gerakan Islam Puritan yang sebenarnya tidak laku di era politik tahun 1950-an. Gerakan PKS lebih mempunyai persamaan dengan gerakan global yang dipengaruhi oleh *Ikhwanul Muslimin* di Mesir.¹

¹ Damanik, A.S. *Fenomena Partai Keadilan. Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2002), Hal.26

Seiring berjalannya waktu, preferensi pemilih terhadap partai politik mulai bervariasi. Partai Politik Islam tidak mampu lagi menyakinkan janji surga bagi para pemilihnya sebagaimana yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Kemajuan informasi dan peningkatan infrastruktur menjadi aktor utama yang mempengaruhi pergeseran suara pemilih dengan signifikan. Apakah fenomena ini menandakan bahwa gerakan Partai Politik Islam sudah tidak relevan lagi dalam sistem politik Indonesia, ataukah ini merupakan kemenangan ideologi nasionalis dalam memperjuangkan ideologinya?. Ataukah ini merupakan bentuk migrasi pemilih ideologi partai politik Islam menjadi pemilih mengambang (*swing voters*)?. Fenomena inilah yang hendak penulis teliti dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian “Perubahan Perilaku Pemilih (*Voting Behaviour*) Partai Politik Islam Dalam Sejarah Kofigurasi Politik Indonesia” menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Jacob Vredenberg, tujuan penelitian deskriptif adalah untuk melukiskan realitas sosial yang kompleks dan sedemikian rupa². Selain itu untuk menguatkan hasil penelitian, dilakukan pula studi perbandingan dengan negara lain. Dari perbandingan ini dapat diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari obyek atau obyek-obyek penelitian dengan alat pembandingnya atau dari obyek penelitian yang satu dengan obyek penelitian yang lainnya.

Pembahasan

Apabila membicarakan tentang definisi Partai Politik, akan banyak teori-teori yang bermunculan. Salah satu definisi yang cukup dikenal dalam kajian ilmu politik adalah definisi yang diberikan oleh Miriam Budiardjo. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.³ Sebagian besar definisi partai politik yang dicetuskan oleh para pakar dan ahli hampir tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Miriam Budiardjo, pada dasarnya Partai Politik adalah organisasi yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan.

Apabila melihat tipenya, partai politik bisa dilihat dari berbagai tipe. Miriam Budiardjo menyebut ada empat jenis partai politik, yaitu partai kader dan partai massa dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaan, serta

² Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1983), Hal.32

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2001), Hal.160-161
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Volume 30, Nomor 2, Juli 2019

partai lindungan dan partai ideologi dilihat dari sifat dan orientasi, sebagai berikut⁴:

- a. Partai Lindungan (*Patronage Party*), umumnya memiliki organisasi nasional yang longgar (sekalipun organisasi ditingkat lokal sering cukup ketat), disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utamanya ialah memenangkan Pemilu untuk anggota-anggotanya yang dicalonkannya, karena itu tipe partai ini hanya giat menjelang masa-masa pemilihan.
- b. Partai Ideologi atau Partai Asas (seperti sosialisme, fasisme, komunisme, kristen-demokrat), biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat.
- c. Partai Massa, mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota; oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur.
- d. Partai Kader, mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan Partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dnegan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang ditetapkan.

Disisi lain menurut Ichlasul Amal, dalam bukunya Pengantar Teori-Teori Mutakhir Politik, perbedaan jenis partai-partai yang ada juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat komitmen Partai terhadap ideologi dan kepentingan:⁵

- (1) Partai Proto adalah tipe awal Partai Politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Partai semacam ini muncul di Eropa barat sekitar abad pertengahan hingga akhir abad ke-19. Ciri paling menonjol partai proto adalah pembedaan antara kelompok anggota atau “ins” dengan non anggota atau “outs”. Selebihnya, partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena itu sesungguhnya partai proto adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologis masyarakat
- (2) Partai Kader merupakan perkembangan lebih lanjut partai proto, Partai ini muncul sebelum diterapkannya sistem hak pilih secara luas bagi rakyat hingga sangat bergantung pada masyarakat kelas menengah atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepeimimpinan, serta para

⁴ Ibid, Hal.21-22

⁵ Ichlasul Amal, *Pengantar Teori-Teori Mutakhir Politik* (Yogyakarta:Tiara Wacana,1988), Hal.31

- pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesungguhnya masih rendah karena aktivitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat.
- (3) Partai Massa muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai suatu respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi hak-hak pilih tersebut. Partai massa dibentuk di luar lingkungan parlemen (ekstra-parlemen), berorientasi pada basis pendukung yang luas misalnya, buruh, petani dan kelompok agama, dan memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya. Tujuan utama partai ini tidak hanya memperoleh kemenangan dalam pemilihan, tapi juga untuk memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elit yang langsung direkrut dari massa.
 - (4) Partai Diktatorial merupakan sub-tipe dari partai massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai ini melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota-anggota partai. Rekrutmen keanggotaan partai diktatorial dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa. Untuk diterima sebagai anggota partai ini seseorang harus lebih dahulu diuji kesetiaan dan komitmennya terhadap ideologi partai. Partai diktatorial menuntut pengabdian secara total setiap anggotanya.
 - (5) Partai *Catch-all* merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. *Catch-all* dapat diartikan sebagai “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Aktivitas partai ini berkaitan erat dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan.

Lantas dimanakah posisi Partai-Partai berideologi Islam di Indonesia?. Apabila meminjam teori Miriam Budiardjo untuk mengklasifikasikan Partai Politik, maka Partai berasaskan Islam bisa dimasukkan sebagai Partai Ideologi (ketika dilihat ideologinya), Partai Massa (apabila dilihat kekuatan massanya), dan bisa juga Partai Kader (apabila menggunakan sistem kaderisasi dalam penentuan jabatannya). Dalam konteks politik Indonesia, ideologi dan massa tidak dapat dipisahkan, ibarat koin bermata dua, keduanya merupakan satu kesatuan. Hal ini bisa dilihat pada kasus Nahdlatul Ulama (NU) yang awalnya merupakan gerakan Islam tradisionalis, dan mempunyai massa yang besar. Tanpa adanya ideologi (*common of ideology*), maka tidak akan muncul gerakan massa yang begitu besar. Kasus ini terjadi pula pada partai-partai politik lain. Hanya saja ideologi kerap kali hanya berubah menjadi alat politik

semata, dan pada akhirnya tidak pernah diimplementasikan sama sekali dalam pengambilan keputusan politik.

Tipe Partai *Catch All* dimana pragmatisme menjadi ideologi tunggal adalah tipe yang paling sesuai dengan kondisi partai politik saat ini. Kondisi politik saat ini yang mementingkan menang dan kalah membuat Partai Politik mencoba lebih dinamis dalam rangka memungut potensi suara sebesar-besarnya dari *voters*. Lantas apakah benar ideologi Islam sudah tidak relevan lagi untuk menjadi *political barter*s untuk menggaet suara rakyat?, sehingga memaksa partai politik untuk masuk ke arena *free market voters* yaitu menjadi partai *catch all*. Apakah benar pemilih partai politik Islam sudah berpindah menjadi *swing voters* yang tidak memilih lagi berdasarkan ideologi namun berdasarkan apa yang mereka dapat dan apa yang partai tawarkan?.

Untuk melihat bagaimana perilaku pemilih, ada tiga teori besar yang menjelaskan mengapa seseorang memilih suatu partai politik⁶. Pertama, teori sosiologis. Seseorang ikut/tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan dilatarbelakangi persoalan sosiologis, seperti kesamaan agama, pendidikan, pekerjaan, ras, dan sebagainya, pola pendekatan ini lebih dikenal dengan mazhab Columbia. Kedua, adalah teori psikologis, yang mana keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak ditentukan oleh kedekatan. Menurut kelompok ini, secara metodologis pendekatan sosiologis dianggap sulit diukur, sebagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama dan sebagainya. Disini para pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya, kelompok ini dikenal dengan sebutan Michigan Model. Dan yang ketiga, adalah pendekatan pilihan rasional (*rational choice*), model yang ketiga ini mengkritik kedua pendekatan sebelumnya. Menurut pendekatan *rational choice*, Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, pembelahan kultural, identifikasi partai melalui proses sosialisasi, pengalaman hidup, merupakan variabel yang secara sendiri-sendiri mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ini berarti variabel lain menentukan atau ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Ada faktor situasional yang ikut mempengaruhi pilihan politik seseorang. Dengan begitu para pemilih bukan hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi bebas untuk bertindak. Faktor situasional ini bisa berupa isu-isu politik pada kandidat yang dicalonkan. Perilaku pemilih tidak harus tetap atau sama, karena karakteristik sosiologis dan identifikasi partai dapat berubah-ubah sesuai waktu dan peristiwa-peristiwa politik tertentu.

⁶ The Study of Electoral Behavior.” In Jan E. Leighley, ed., *The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior*, (New York: Oxford University Press, 2010), Hal. 239-261

Dengan begitu, isu-isu politik menjadi pertimbangan yang penting dimana para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaian terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan.

Partai Politik Islam di Indonesia

Partai Politik di Indonesia pada periode Pemilu 1955 dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Partai Politik ideologi Islam yang terdiri dari Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), Partai NU, PSII, Perti dan Partai ideologi Nasionalis yang termasuk diantaranya adalah PNI, PKI (sebelum dibubarkan), IPKI dan Murba. Fragmentasi politik Indonesia bisa dengan mudah dilakukan di awal-awal berdirinya bangsa. Hal itu disebabkan adanya *common issue* antara dua kelompok tersebut dalam menghadapi isu yang relatif sensitif yaitu mengenai pembahasan konstitusi baru untuk menggantikan Konstitusi Sementara. Sebagian besar kelompok pendukung Partai Islam menghendaki agar konstitusi Indonesia kedepannya harus lebih menjunjung nilai-nilai Islam dengan merujuk pada Piagam Jakarta, namun sebaliknya pendukung gerakan nasionalis menghendaki agar Indonesia kembali ke UUD 1945.

Ide negara Islam tersebut membuat pergeseran politik mengerucut ke dua kelompok besar. Partai Kristen yang sebenarnya mempunyai ideologi berbeda dengan nasionalis akhirnya memilih bergabung dengan faksi nasionalis dikarenakan kekhawatiran apabila dimenangkan oleh kelompok Islam maka mereka akan menjadi warga kelas dua (*lower citizen*).

Tabel 1
Pembagian Kursi DPRS dan DPR
Hasil Pemilu 1955

Parpol	DPR Hasil Pemilu 1955	
	Jumlah Kursi	Prosentase (%)
Orpol Non Agama	127	49,4%
Orpol Islam	116	45,2%
Orpol Kristen	14	5,4%
Jumlah	257	100,0%

Sumber : Diolah dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum

Peta politik saat itu memang relatif sangat berimbang. Posisi partai kristen sebenarnya sangat strategis, meskipun prosentase suaranya kecil. Sikap politik Partai Kristen akan menentukan manakah kelompok yang akan memimpin perolehan suara di parlemen. Terlihat dalam tabel diatas, jumlah perolehan partai politik Islam cukup signifikan walaupun belum mampu menandingi nasionalis. Akan tetapi apabila Orpol agama (Islam dan Kristen) mempunyai satu isu yang sama, bisa jadi secara kumulatif jumlahnya lebih besar daripada partai nasionalis.

Pertentangan ideologi tersebut pada akhirnya berakhir ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya adalah pembubaran konstituante. Padahal konstituante adalah produk resmi demokrasi Pemilu 1955. Akan tetapi tidak adanya reaksi perlawanan dari masyarakat membuat proses “*pembegalan*” demokrasi tersebut berjalan lancar tanpa adanya protes yang berlebihan. Setelah itu praksis partai politik Islam mulai kehilangan *common issue* (isu bersama) yang sebelumnya mempersatukan mereka dalam satu gerakan *intra parlement*.

Hilangnya isu yang menyatukan mereka, membuat Partai Politik Islam mengalami friksi-friksi internal yang sejatinya sudah hadir sejak lama. Paska orde lama digantikan oleh Orde Baru, partai islam dipaksa untuk berfusi kedalam satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Akan tetapi sejarah terulang kembali, Isu Islam Modernis dan Tradisionalis, yang memecah Partai Masyumi menjadi dua yaitu Partai Masyumi dan NU kembali terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan.

Pada akhirnya Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan satu-satunya Partai yang bernafaskan nilai-nilai Islam pun harus tercerai berai disebabkan problem internalnya yang berlarut-larut. Titik kulminasi retaknya PPP terjadi ketika NU pada Mukttamar NU 1984 di Situbondo secara resmi membuat keputusan bersejarah yaitu kembali ke *khittah* NU 1926, yaitu NU lepas dari perannya sebagai organisasi politik. Menurut keputusan Mukttamar , arah perjalanan NU selama ini telah menyimpang dari maksud dan tujuan didirikannya NU oleh para pendirinya⁷. Perubahan arah politik NU mengurangi suara PPP secara drastis pada Pemilu 1987, dari partai yang dianggap kompetitif dan layak bersaing, PPP justru semakin lekat dengan Partai medioker serta semakin tertinggal jauh dari Golkar.

Tabel 2

Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977,1982, dan 1987

Orpol	Prosentase Suara			Jumlah Kursi		
	1977	1982	1987	1977	1982	1987
Golkar	62,1 %	64,3%	73,16%	232	242	299
PPP	29,3%	27,8%	15,97%	99	94	61
PDI	8,6%	8,6%	10,87%	29	24	40
Total	100%	100%	100%	360	360	400

Sumber : diolah dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum

Terlihat dari tabel di atas, posisi PPP sebagai Partai Politik Hasil Fusi Partai-Partai Islam sebenarnya cukup signifikan, akan tetapi sejak Mukttamar NU Tahun 1984 di Situbondo yang menyatakan bahwa NU kembali ke *khittah* 1926 dan menyatakan keluar dari PPP, perolehan suara PPP merosot sangat

⁷ Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa : Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2010), Hal.62

tajam merosot hingga hampir 50% dibandingkan perolehan suaranya pada Pemilu sebelumnya.

Partai Politik Islam di Era Reformasi

Reformasi Politik pada tahun 1999 membuka lembaran baru sistem politik Indonesia dari sebelumnya menganut sistem dua partai (*two-party system*) menjadi sistem multi partai (*multy-party System*). Pada hakikatnya, sistem dua partai paling relevan untuk Indonesia yang menganut sistem presidensial, akan tetapi penerapan sistem dua partai yang melalui mekanisme fusi dari penguasa dianggap menciderai nilai-nilai luhur demokrasi yaitu hak untuk berserikat, berkumpul dan membentuk partai politik. Berangkat dari semangat itulah pendirian partai politik kemudian dibuka selebar-lebarnya serta diberi peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik baru.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik pada akhirnya disahkan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang tersebut, persyaratan untuk membentuk partai politik baru sangat mudah, yaitu hanya dibentuk oleh 50 (lima puluh) orang WNI yang berumur 21 tahun dan didaftarkan di Departemen Kehakiman bersama dengan akta notaris.

Dibukanya *kran* demokrasi sebesar-besarnya membuat gairah untuk membentuk kembali partai Islam bermunculan. Tercatat pada tahun 1999, Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengesahkan 148 Partai Politik baru berbadan hukum dengan pandangan ideologi yang berbeda-beda.

Tabel 3
Partai Politik Baru Berbadan Hukum Tahun 1999

Idelogi Parpol	Jumlah	Prosentase (%)
Nasionalis	91	61,48 %
Islam	31	20,95%
Kristen	1	0,67%
Katolik	4	2,71%
Sosialis	10	6,75%
Lain-Lain	11	7,44%
Total	148	100 %

Sumber : diolah dari data di Kementerian Hukum dan HAM RI

Identifikasi Partai Islam pada tabel diatas didasarkan pada Partai yang memasang simbol Islam pada namanya serta mempunyai basis suara Islam sebagai pendulum suaranya -Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional termasuk dalam Partai yang mempunyai ideologi Islam-. Sementara itu Partai yang berideologi lain-lain dalam Tabel ini adalah Partai yang mempunyai visi dan misi khusus serta dianggap mewakili kelompok minoritas

(*minority group*). Contoh partai politik yang termasuk dalam kelompok lain-lain yaitu, Partai Hijau yang memfokuskan gerakannya pada lingkungan, lalu Partai Seni dan Dagelan Indonesia yang memperjuangkan hak-hak komedian, Partai Reformasi Tionghoa Indonesia yang berorientasi pada egalitarisasi kelompok Tionghoa di Indonesia. Selain itu terdapat pula Partai Buddhis Demokrat Indonesia yang merupakan partai yang mengakomodir pemeluk agama Buddha di Indonesia.

Secara kumulatif, jumlah partai Islam cukup besar apabila dibandingkan dengan partai-partai lain. Secara jumlah, partai politik Islam hanya kalah dari partai politik beraliran nasionalis, memori indah akan kejayaan partai politik Islam benar-benar dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk mencoba merebut hati para pemilih baru yang merindukan kebebasan berdemokrasi yang terpenjara selama rejim orde baru.

Jumlah 148 Partai Politik tersebut diatas ternyata tidak semuanya mampu memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilu 1999. Pemilu 1999, tercatat hanya 48 partai politik yang bisa berpartisipasi dalam Pemilu 1999. Partai politik tersebut diantaranya adalah :

Tabel 3
Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 1999

Nama Partai Politik	Ideologi	Suara	Prosentase
Partai Indonesia Baru (PIB)	Nasionalis	192.712	0,18%
Partai Kristen Nasional Indonesia	Kristen	369.719	0.35%
Partai Nasional Indonesia – Supeni	Nasionalis	377.137	0,36%
Partai Aliansi Demokrat Indonesia	Nasionalis	85.838	0,08%
Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (Partai Kami)	Islam	289.489	0,27%
Partai Ummat Islam (PUI)	Islam	269.309	0.25%
Partai Kebangkitan Ummat (PKU)	Islam	300.064	0,22%
Partai Masyumi Baru	Islam	152.589	0,14%
Partai Persatuan Pembangunan	Islam	11.329.905	10,71%
Partai Syarikat Islam Indonesia	Islam	375.920	0,36
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Nasionalis	35.689.073	33,74%
Partai Abul Yatam	Nasionalis	219.379	0,20%
Partai Kebangsaan Merdeka (PKM)	Nasionalis	104.385	0,10%
Partai Demokrasi Kasih Bangsa	Katolik	550.846	0,52%
Partai Amanat Nasional (PAN)	Islam	7.528.956	7,12%

Partai Rakyat Demokratik (P R D)	Sosialis	78.730	0,07%
Partai Syarikat Islam Indonesia	Islam	152.820	0,14%
Partai Katolik Demokrat (P K D)	Katolik	216.675	0,20%
Partai Pilihan Rakyat (Pilar)	Nasionalis	40.517	0,04%
Partai Rakyat Indonesia (PARI)	Nasionalis	54.790	0,05%
Partai Politik Islam Indonesia Masyumi	Islam	456.718	0,43%
Partai Bulan Bintang (PBB)	Islam	2.049.708	1,94%
Partai Solidaritas Pekerja (PSP)	Sosialis	61.105	0,06%
Partai Keadilan (PK)	Islam	1.436.565	1,36%
Partai Nahdlatul Ummat	Islam	679.179	0,64%
Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis	Nasionalis	365.176	0,35%
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	Nasionalis	328.654	0,31%
Partai Republik	Nasionalis	328.564	0,31%
Partai Islam Demokrat (PID)	Islam	62.901	0,06%
Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen	Nasionalis	345.629	0,33%
Partai Musyawarah Rakyat Banyak	Nasionalis	62.006	0,06%
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	Nasionalis	345.720	0,33%
Partai Golongan Karya (Golkar)	Nasionalis	23.741.749	22,44%
Partai Persatuan (PP)	Islam	655.052	0,62%
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Islam	13.336.982	12,61%
Partai Uni Demokrasi Indonesia	Nasionalis	140.980	0,13%
Partai Buruh Nasional (PBN)	Sosialis	140.980	0,13%
Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Partai MKGR)	Nasionalis	204.204	0,19%
Partai Daulat Rakyat (PDR)	Nasionalis	427.854	0,40%
Partai Cinta Damai	Nasionalis	168.087	0,16%
Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP)	Nasionalis	1.065.686	1,01%
Partai Pekerja Indonesia	Nasionalis	63.934	0,06%
Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)	Sosialis	49.807	0,05%
Partai Nasional Bangsa Indonesia	Nasionalis	149.136	0,14%
Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI)	Nasionalis	364.291	0,34%

Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (Partai Suni)	Nasionalis	180.167	0,17%
Partai Nasional Demokrat (PND)	Nasionalis	96.984	0,09%
Partai Ummat Muslimin Indonesia	Islam	48.839	0,05%
Total		105.786.661	100,00%

Sumber : Arsip Kementerian Hukum dan HAM RI

Apabila kita melihat dengan proporsi berdasarkan ideologi, maka akan ditemukan angka sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Pemilu 1999

Ideologi Parpol	Jumlah	Prosentase
Nasionalis	64.813.998	61,26%
Islam	39.124.401	36,98%
Lain-Lain	1.848.262	1,76%
Total	105.786.661	100%

Sumber: Diolah dari Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum

Terlihat dari tabel di atas secara jumlah, suara Partai Nasionalis mampu meraup suara yang signifikan. Hal itu disebabkan masih terdapatnya suara-suara kelompok Islam yang mendukung Partai Politik beraliran Nasionalis, seperti Partai Golkar yang dikenal mempunyai akar rumput yang sangat mengakar di masyarakat. Akan tetapi apabila kita lihat, perolehan suara Partai yang berideologi Islam cukup signifikan. Berangkat dari kelompok Islam inilah muncul poros tengah yang berhasil menempatkan KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI.

Pada Pemilu 2004, arah politik mulai berubah mengikuti arus romantisme masyarakat. Kegagalan KH Abdurrahman Wahid dalam mempertahankan posisi Presiden serta adanya konflik antara eksekutif dan legislatif tidak membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik Islam menurun. Hal ini menunjukkan bahwa suara pemilih partai politik Islam masih menempatkan basis ideologi sebagai acuan.

Tabel 5
Hasil Pemilu 2004

Partai	Ideologi	Jumlah Suara	Prosentase
Partai Golongan Karya	Nasionalis	24.461.104	21,62%
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Nasionalis	20.710.006	18,31%
Partai Kebangkitan Bangsa	Islam	12.002.885	10,61%
Partai Persatuan Pembangunan	Islam	9.226.444	8,16%
Partai Demokrat	Nasionalis	8.437.868	7,46%

Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Volume 30, Nomor 2, Juli 2019

Partai Keadilan Sejahtera	Islam	8.149.457	7,20%
Partai Amanat Nasional	Islam	7.255.331	6,41%
Partai Bulan Bintang	Islam	2.965.040	2,62%
Partai Bintang Reformasi	Islam	2.944.529	2,60%
Partai Damai Sejahtera	Kristen	2.424.319	2,14%
Partai Karya Peduli Bangsa	Nasionalis	2.394.651	2,12%
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Nasionalis	1.420.085	1,26%
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Nasionalis	1.310.207	1,16%
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Nasionalis	1.228.497	1,09%
Partai Patriot Pancasila	Nasionalis	1.178.738	1,04%
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Nasionalis	906.739	0,80%
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	Islam	890.980	0,79%
Partai Pelopor	Nasionalis	896.603	0,79%
Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Nasionalis	844.480	0,75%
Partai Merdeka	Nasionalis	839.705	0,74%
Partai Sarikat Indonesia	Nasionalis	677.259	0,60%
Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Nasionalis	669.835	0,59%
Partai Persatuan Daerah	Nasionalis	656.473	0,58%
Partai Buruh Sosial Demokrat	Sosialis	634.515	0,56%
Total		113.127.750	100%

Sumber : diolah dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum

Kita lihat dari tabel diatas, suara partai Islam justru meningkat meskipun tipis. Meskipun di daerah-daerah yang sebelumnya menjadi kantong suara Partai-Partai Islam seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, suara Partai Islam menurun akan tetapi hal itu lebih disebabkan adanya perpecahan didalam partai politik Islam sehingga memecah partai Islam menjadi partai-partai kecil. Berdasarkan tabel diatas, berikut adalah konfigurasi partai politik pada Pemilu 2004.

Tabel 6
Konfigurasi Politik Pemilu 2004

Ideologi Parpol	Jumlah	Prosentase
Nasionalis	68.724.170	60,7%
Islam	43.434.666	38,39%
Lain-Lain	3.058.834	1,76%

Total	113.125.750	100%
--------------	--------------------	-------------

Sumber : diolah dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum RI

Terlihat dari data diatas tidak ada perubahan yang relatif signifikan dibandingkan hasil pada Pemilu 1999. Dimana proporsi kekuatan Partai Islam tidak bergeser dari angka 30-an% meskipun pada beberapa partai nasionalis terjadi perubahan yang signifikan terutama pada perolehan suara PDI-P. Kegagalan Megawati (Ketua Umum PDI-P) dalam mengelola pemerintahan semenjak menggantikan KH Abdurrahman Wahid dipandang menjadi faktor utama. Akan tetapi yang mengejutkan adalah peningkatan pesat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan Partai berasas Islam namun lebih mengandalkan kaderisasi dibandingkan kekuatan massa dan ideologi.

Pada tahun 2009, pergerakan Partai berideologi Islam mulai diuji keteguhannya akankah tetap konsisten mengusung asas ideologi Islam ataukah berani mendeklarasikan dirinya sebagai partai terbuka. Pada Pemilu 2009, sejumlah Partai Politik pada akhirnya memilih untuk mendeklarasikan partainya menjadi partai terbuka. Mereka mengharapkan loyalitas massanya tetap bertahan, disisi lain ada harapan untuk memancing suara masyarakat terutama pemilih pemula yang dianggap potensial untuk mendongkrak perolehan suara partai politik.

Tabel 7
Hasil Pemilu 2009

Partai	Ideologi	Jumlah Suara	Prosentase
Partai Hati Nurani Rakyat	Nasionalis	3.925.620	3,77%
Partai Karya Peduli Bangsa	Nasionalis	1.461.375	1,40%
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	Nasionalis	745.965	0,72%
Partai Peduli Rakyat Nasional	Nasionalis	1.260.950	1,21%
Partai Gerakan Indonesia Raya	Nasionalis	4.642.795	4,46%
Partai Barisan Nasional	Nasionalis	760.712	0,73%
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Nasionalis	936.133	0,90%
Partai Keadilan Sejahtera	Islam	8.204.946	7,89%
Partai Amanat Nasional	Islam	6.273.462	6,03%
Partai Perjuangan Indonesia Baru	Nasionalis	198.803	0,19%
Partai Kedaulatan	Nasionalis	438.030	0,42%
Partai Persatuan Daerah	Nasionalis	553.299	0,53%
Partai Kebangkitan Bangsa	Islam	5.146.302	4,95%
Partai Pemuda Indonesia	Nasionalis	415.563	0,40%

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Nasionalis	317.433	0,31%
Partai Demokrasi Pembaruan	Nasionalis	896.959	0,86%
Partai Karya Perjuangan	Nasionalis	351.571	0,34%
Partai Matahari Bangsa	Islam	415.294	0,40%
Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Nasionalis	139.988	0,13%
Partai Demokrasi Kebangsaan	Nasionalis	671.356	0,65%
Partai Republik Nusantara	Nasionalis	631.814	0,61%
Partai Pelopor	Nasionalis	345.092	0,33%
Partai Golongan Karya	Nasionalis	15.031.497	14,45%
Partai Persatuan Pembangunan	Islam	5.544.332	5,33%
Partai Damai Sejahtera	Kristen	1.522.032	1,46%
Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia	Nasionalis	468.856	0,45%
Partai Bulan Bintang	Islam	1.864.642	1,79%
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Nasionalis	14.576.388	14,01%
Partai Bintang Reformasi	Islam	1.264.150	1,21%
Partai Patriot	Nasionalis	547.798	0,53%
Partai Demokrat	Nasionalis	21.655.295	20,81%
Partai Kasih Demokrasi Indonesia	Katolik	325.771	0,31%
Partai Indonesia Sejahtera	Nasionalis	321.019	0,31%
Partai Kebangkitan Nasional Ulama	Islam	1.527.509	1,47%
Partai Merdeka	Nasionalis	111.609	0,11%
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	Islam	146.831	0,14%
Partai Sarikat Indonesia	Nasionalis	141.558	0,14%
Partai Buruh	Sosialis	265.359	0,26%
Total		104.048.118	100%

Sumber : situs resmi Komisi Pemilihan Umum

Pada pemilu 2009, jumlah Partai Politik yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu jauh lebih besar dibandingkan dengan Pemilu 2004. Partai-partai baru tersebut sebenarnya bukanlah murni partai politik baru, melainkan hasil dari friksi internal di partai politik yang tidak mampu diselesaikan melalui mekanisme muktamar/kongres. Partai Hanura dan Partai Gerindra adalah pecahan dari Partai Golkar, Partai Demokrasi Pembaruan adalah hasil konflik

internal di tubuh PDI-P. Disisi lain, tren konflik internal dan membentuk partai baru juga dialami oleh partai politik berideologi Islam. Partai Kebangkitan Bangsa melahirkan sempalan Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Persatuan Pembangunan melahirkan Partai Bintang Reformasi, sedangkan Partai Amanat Nasional juga memunculkan Partai Matahari Bangsa.

Tabel 9
Konfigurasi Pemilu Tahun 2009

Ideologi Parpol	Jumlah	Prosentase
Nasionalis	71.547.478	68,76%
Islam	30.387.018	29,20%
Lain-Lain	2.113.162	2,04%
Total	104.048.118	100%

Sumber : diolah dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum

Dari tabel diatas, terlihat suara partai Islam mengalami penurunan yang signifikan. Meskipun sejumlah Partai Islam telah mendeklarasikan dirinya sebagai partai terbuka dengan cara merekrut calon anggota legislatif dari kelompok-kelompok minoritas, akan tetapi pola tersebut ternyata tidak berpengaruh signifikan bagi peningkatan suara partai politik Islam di Indonesia.

Pada Pemilu 2014, Partai Kebangkitan Bangsa merekrut Rudi Kirana (CEO Lion Air) sebagai salah satu pengurusnya. Langkah politik PKB semakin mengindikasikan keinginannya untuk menjadi Partai yang tidak hanya terjebak pada dogmatisme ideologi semata, disisi lain Partai Amanat Nasional juga melakukan hal serupa dengan membuka kesempatan bagi para tokoh-tokoh layar kaca yang populer untuk menjadi *vote getters* bagi partai politik.

Persyaratan yang berat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu membuat jumlah partai politik yang diperbolehkan berpartisipasi dalam Pemilu menjadi berkurang drastis. Hal ini membuat suara-suara dari partai politik nasionalis maupun islam berkumpul di 12 partai politik sebagaimana yang tercantum pada Tabel 10.

Tabel 10
Hasil Pemilu 2014

Partai	Ideologi	Jumlah Suara	Prosentase
Partai Nasdem	Nasionalis	8.402.812	6,72
Partai Golongan Karya	Nasionalis	18.432.312	14,75%
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Nasionalis	23.681.471	18,95%
Partai Kebangkitan Bangsa	Islam	11.198.957	8,4%

Partai Persatuan Pembangunan	Islam	8.157.488	6,53%
Partai Demokrat	Nasionalis	12.728.913	10,9%
Partai Keadilan Sejahtera	Islam	8.480.104	7,1%
Partai Amanat Nasional	Islam	9.481.621	7,59%
Partai Bulan Bintang	Islam	1.825.750	1,46%
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Nasionalis	1.143.094	0,91%
Partai Hati Nurani Rakyat	Nasionalis	6.579.498	2,9%
Partai Gerakan Indonesia Raya	Nasionalis	14.760.371	11,81%
Total		124.972.491	100%

Sumber : Situs resmi Komisi Pemilihan Umum RI

Berdasarkan hasil pemilu di Tabel 10, konfigurasi partai politik hasil pemilu 2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 11
Konfigurasi Hasil Pemilu 2014

Ideologi Parpol	Jumlah	Prosentase
Nasionalis	85.728.471	68,7%
Islam	39.143.920	31,3%
Total	124.972.491	100%

Sumber : diolah dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum RI

Pada Pemilu 2014, Partai-Partai Politik mulai mendeklarasikan dirinya sebagai Partai terbuka selain usahanya untuk menggaet kembali konstituennya yang telah berpindah hati ke partai politik lain. Hal ini dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa semenjak Gus Dur yang merupakan salah satu ikon politiknya keluar, serta diikuti lahirnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Begitu pula dengan PPP yang bercerai-berai sejak konflik internal dan kemudian melahirkan Partai Bintang Reformasi. Usaha itu terbilang cukup berhasil dengan meningkatnya suara partai-partai Islam pada Pemilu 2014.

Tabel 11
Tabulasi Suara Partai Politik Islam

Parpol	1955	1977	1982	1987	1999	2004	2009	2014
Nasionalis	49,4	62,1	64,3	73,16	61,26	60,75	68,76	68,7%
Islam	45,2	29,3	27,8	15,97	36,98	38,4	29,20	31,3%

Sumber : diolah dari berbagai sumber resmi Komisi Pemilihan Umum RI

Apabila kita lihat dalam tabel 11, perolehan suara Partai Politik Islam mengalami perubahan yang dinamis. Pemilu 1955 merupakan bukti bahwa partai Islam sebenarnya memiliki jumlah pemilih yang sangat potensial apabila dihadapkan pada isu yang sama (agama). Akan tetapi seiring berjalannya

waktu membuat Partai Politik yang mengandalkan ideologi sudah tidak relevan lagi. Hal ini disebabkan semakin banyaknya karakter pemilih yang dipegaruhi berbagai faktor. Kelompok pemilih pemula (*new voters*) tentu saja akan lebih melihat platform serta visi dan misi partai politik dibandingkan kedekatan sosiologis (agama, suku, ras, dll). Kondisi ini coba diantisipasi oleh sejumlah Partai Politik Islam di Indonesia dengan menyatakan dirinya sebagai Partai terbuka, sebagaimana yang dilakukan oleh PKB, PAN, dan terakhir PKS meskipun hasilnya bisa dianggap belum terlalu menggembirakan.

Dari tabel diatas dapat pula disimpulkan, telah terjadi perubahan preferensi pemilih partai politik Islam di Indonesia, yang sebelumnya memilih berdasarkan faktor-faktor sosiologis (agama, ras, pendidikan, suku, dll) berubah didasarkan pada pilihan yang rasional (*rational choice*), pemilih partai politik Islam dari yang sebelumnya pemilih tetap (*fixed voters*) menjadi pemilih mengambang (*swing voters*).

Kesimpulan

Pemilu adalah sarana paling demokratis untuk merepresentasikan suara rakyat. Pemilih sebagai pemilik kedaulatan selalu mempunyai preferensi dalam menjatuhkan pilihannya. Dalam konteks partai Islam, sejarah Pemilu membuktikan bahwa terjadi pasang surut suara pemilih. Pada era orde baru, fenomena tersebut disebabkan fusi partai politik yang dipaksakan oleh pemerintah sehingga menimbulkan banyak pihak yang tidak sepaham memutuskan untuk tidak berkontribusi. Akan tetapi alasan tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar. Pada era reformasi, Partai Politik yang dideklarasikan oleh NU dan Muhammadiyah yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia memperoleh suara yang tidak terlalu signifikan. Bahkan dalam 2 (dua) periode Pemilu terakhir, suara Partai Politik Islam terus mengalami penurunan. Fenomena ini membuktikan dua hal penting, yaitu *pertama*, ideologi, agama, dan kesukuan sudah tidak terlalu signifikan mempengaruhi perolehan suara, Partai Politik Islam terlihat gagal mengantisipasi kondisi tersebut sehingga mereka berusaha masuk ke area *free market voters* dan memposisikan dirinya sebagai Partai terbuka (*caceth all*). Kedua, Pemilih partai politik ideologi dan massa semakin berkurang jumlahnya dan menjadi pemilih mengambang (*swing voters*), hal ini bisa jadi disebabkan arus informasi yang semakin tidak terbatas disisi lain Partai Politik kurang tanggap sehingga menimbulkan kekecewaan pemilih. Kemungkinan besar pemilih yang mengganti pilihannya didasarkan pada gagalnya partai politik mengimplementasikan visi-misinya serta menepati janji-janji politiknya.

Kondisi ini harus dicermati oleh Partai Politik Islam agar perolehan suaranya tidak terus menerus menurun. Ide-ide yang berlatarbelakang sosiologis sudah tidak relevan dalam konteks demokrasi yang menjunjung nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi. Partai Politik Islam masih mampu bersaing apabila penerapan-penerapan nilai-nilai Islam berhasil dijalankan.

Hal ini terjadi Pada kasus meroketnya suara Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2004 yang disebabkan penerapan nilai-nilai Islami seperti anti korupsi dan tata krama dalam berpolitik. Untuk kedepannya partai politik Islam harus mengadopsi nilai-nilai Islam seperti anti korupsi, etika politik untuk bersaing kembali dalam arena dengan partai-partai nasionalis.

Daftar Pustaka

- Amal, Ichlasul, *Pengantar Teori-Teori Mutakhir Politik* ,Yogyakarta : Tiara Wacana, 1988
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 2001
- Damanik, A.S. , *Fenomena Partai Keadilan. Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Teraju, 2002
- Ridwan, Nur Khalik, *NU dan Bangsa : Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2010
- The Study of Electoral Behavior.” In Jan E. Leighley, ed., *The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior*,New York: Oxford University Press, 2010
- Vredenberg, Jacob, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1983